KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : TNI Jangan Ditarik Ke Persaingan Politik
Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kasus Kekerasan Ke Relawan

TNI Jangan Ditarik Ke Persaingan Politik

KETUA Komisi I DPR Meutya Viada Hafid menyoroti kasus kekerasan yang menimpa relawan pendukung salah satu Calon Presiden (Capres) di Boyolali, beberapa waktu lalu. Kasus itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan netralitas TNI. Dia pun mewanti-wanti agar TNI tidak ditarik-tarik ke dalam konteks persaingan Pemilu Presiden 2024.

"Sangat disayangkan jika kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya," sesal Meutya, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (3/1/2024).

Seharusnya, kata dia, masalah kekerasan yang diduga dilakukan oknum TNI kepada pendukung salah satu capres tersebut, diserahkan sepenuhnya ke proses hukum yang ada.

Diyakininya, kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan persaingan politik tahun 2024.

"TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI," tegas politisi perempuan Partai Golkar ini.

Dia bilang, jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan.

"Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan," wantinya lagi.

Meutya juga mengajak semua pihak tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Sebagai contoh, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023 menempatkan TNI di tingkat teratas dengan presentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.

"TNI adalah kebanggaan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi," pungkasnya.

Sementara, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison memastikan, proses penegakan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oknum TNI dilakukan secara independen.

Adapun dalam perkara ini, pihaknya telah menetapkan enam anggota TNI sebagai tersangka. ■ KAL